

**Pemetaan Retribusi Daerah 5 Kota Besar Di Indonesia Dalam Rangka  
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**



**Skripsi Oleh  
Karina Wulandari  
01031481619059  
Akuntansi**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana  
Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUTANSI  
2019**

**LEIVi BAR PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL**

P2ML I AAN R E FR JBUSI DAERAH 10 KOTA BES Ak DI IN DONES IA  
DALAM RAN G KA PENING KATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Disusun oleh:

Nama                karina Wulandari

Nim                01031481619059

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : A Luntansi

Bidang Kajian : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui Untuk Digunakan Dalam Seminar Proposal

Tanggal Persetujuan

**Dosen Penibimbng**

Tiinggal



**Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.**

**NIP. 196407271994032001**

Tanggal :

Rika Hen da Sa fiti i, S. k., M.dcc, Ak  
NIP. 19870530201140420111

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pemetaan Retribusi Daerah 5 kota Besar Di Indonesia  
Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Disusun oleh :

Nama : Karina Wulandari

Nim 01031481619059

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/ Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal dan telah memenuhi syarat  
untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 30 Juli, 2019

Kelua

Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak

NIT'. 1964090319994032001

Anggota

Rika Henda Safitri, S.B..M.Acc.Ak

NIP. 198705302014042001

Anggota

Dt. B. Yusnaini, S.E, M.Si

N&. 1977041720101122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki, S.R., M.Acc., AT  
NIP. 1973033171997031002

## **SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Karina Wulandari  
**NIM** 01031481619059  
**Fakultas** : Ekonomi  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Bidang Ksjian** : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang bejudul:

**Pemetaas Retribusi Daerah 10 kota Besar Di Indonesia Dalam Rnngks  
Penagkntan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pembimbing

**Ketua** : Hj. Rochmawati Daud, M.Si., Ak., CA  
**Anggota** : Rika Henda Safitri, S.E., M.Aoc, Ak.  
**Tanggal Ujian** . 30 Juli 2019

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbemya. Demikianlah pernyataan ini saya bust dengan sebenamya, dan apabila pemyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dREAMT predikat kelulusan dan gelar kesajaaan.

Palembang, 2019

Yang memberi Pernyataan,



Karina Wulandari

NIM : 01031481619059

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Pekerjaan yang terlihat sulit bukan berarti tidak bisa diselesaikan, dengan usaha sungguh-sungguh maka akan terlihat penyelesaian masalah itu dengan jalan yang tidak terduga.*
- *Saya lebih senang pemuda uang merokok dan minum kopi sambil diskusi tentang bangsa ini, dari pada pemuda kutu buku yang hanya memikirkan dirinya sendiri. –Soekarno-*
- *Sungguh obat kebodohan adalah bertanya. (Hadist Riwayat Abu Dawud no. 336 dan dishahihkan Syaikh Al-Albani).*

**Karya Kecil ini kupersembahkan kepada :**

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
2. Orang tuaku tercinta
3. Keluarga Besarku
4. Sahabat dan teman-temanku semua
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul **“Pemetaan Retribusi Daerah 10 Kota Besar Di Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Palembang Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 (Studi Kasus di Beberapa Titik Parkir Kecamatan Bukit Kecil). Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. **Hj. Rina Tjandradikirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku Pengelola Akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
5. **Hj. Rochmawati Daud., M.Si., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing serta memberikan saran kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Rika Henda Safitri,S.E.,M.acc.,Ak** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran, waktu dan bimbingannya selama menempuh pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. **Arista Hakiki,S.E.,M.acc.,Ak** sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

9. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya.
10. Kepada kedua Orang Tua dan adik-adik saya.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Kampus Palembang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, 29 Juli 2019

Karina Wulandari

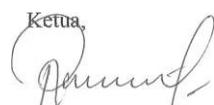
## **ABSTRAE**

### **PEMETAAN RETRIBUSI DAERAH 5 KOTA BASER DI INDONESIA DALAM RANGKA FENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

01031481619039

Tujuan Penelitian ini mengkaji jenis retribusi daerah manakah yang menuadai sumber unggulan potential, berkembang, dan terbelum daaiain peningkatan Pendepatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah di 5 Kota Beser Indonesia tahun 2017-2018. Data dalam peneliaan ini mongguncalan data time series, dengan metode analisis secara kuantitatif yaitu pemetaan secara grafik dan tipologi klassea. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dari 20 Jenis retribusi di Kota Jakarta tahun 2017-2018 terdapat 4 Jenis retribusi unggulan dan potential, 9 jenis retribusi berekembang dan 3 retribusi terbelakang (2) Dari 20 Jenis retribusi di Kota Surabaya tahun 2017-2018 tidak terdapat 8 retribusi unggulan, terdapat 1 jenis retribusi potensial dan 8 jenis retribusi terbelakang dan 3 jenis retribusi terbelakang (3) Dari 27 Jenis retribusi di Kota Bandung tahun 2017-2018 terdapat 7 retribusi wiggulan, 2 jenis retribusi potensial dan 17 jenis retribusi terbelakang serta tidak terdapat jenis retribusi berkembang. (4) Dari 20 Jenis retribusi di Kota Bekasi tahun 2017-2018 terdapat 9 Jenis retribusi unggulan, 1 retribusi potensial dan 10 jenis retribusi terbelakang dan tidak terdapat jenis retribusi yang berkembang (5) Dari 12 Jenis Retribusi di Kota Medan tahun 2017-2018 terdapat 3 Jenis retribusi unggulan potensial dan 6 jenis retribusi terbelakang sem tidak terdapat jenis retribusi yang berkeinbang

Kata kunci: *Retribusi Daerah Tipologi Klossen*

Ketua,  


Hi. Rochmawati Haud, S.E., M.Si, Ak  
NIP. 196409031994032001

Anggota



Rika Henda Safitri S.E.M Acc. Ak  
NIP. 198705302014042001

Mengetahui,  


Arista Hekiki S.E., M Acc., Ak  
NIP. 1973033171997031002

## ABSTRACT

### MAPPWG OF REGIONAL RETRACTION IN FIVE MAJOR CITYS OF INDON ASIA IN INCHASWC LOCAL OWN-SOURCE REMNU

**01031481619059**

This research aims to examine which of the following types of regional retribution is excellent source, developing, and underdeveloped in increasing Local Own-source Revenue for the government of 5 major cities of Indonesia from 2017 to 2018. The analyzer tool used is graph mapping and klassen typology. This research indicates that 1) Out of 20 types of retribution in Jakarta from 2017 to 2018 there were four types of superior and potential retribution, nine types of developing retribution and three types of underdeveloped one (2) Out of twenty types of retribution in Surabaya from 2017 to 2018 there were no eight types of superior retribution, but one type of potential retribution, eight types of underdeveloped retribution and three types of underdeveloped retribution (3) Out of twenty-seven types of retribution in Bandung from 2017 to 2018 there were seven types of superior retribution, two types of potential retribution and seventeen types of underdeveloped retribution and zero type of developing one (4) Out of twenty types of retribution in Bekasi from 2017 to 2018 there were nine types of superior retribution, a type of potential retribution, ten types of underdeveloped retribution and zero type of developing one (5) Out of twenty types of retribution in Medan from 2017 to 2018 there were three types of superior and potential retribution, six types of underdeveloped retribution and zero type of developing one.

Keywords: *regional retribution, Kla.i.men Typology*

first Advisor,

Hj. Rochmawati Daud SE MM SISAKAK  
NIP. 196409031994032001

Member,

Rika Henda Safitri. S.E., txt Acc , Ak  
NIP. 198705302014042001

Head of Accounting Department,

Arista Idakiki S E M Acc Ak  
NIP. 197303311997031002

## SURAT PERNYATAAN

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa Skripsi dari mahasiswa :

Nama : KarJna Wulandari  
NIM : 01031481619059  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Pemetaan Retribusi Daerah S Kota Besar Di Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Telah kami periksa cara penulisan, *B·ammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, Juli 2019  
Ketua Anggota

Rochmawati Daud. S.E. M.Si., AT Rita Henda Sa fitri S.E M Acc Ak  
NIP. 196409031994032001 NIP. 198705302014042001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

Arista Hakiki. S.E.N.Acc Ak.  
NIP.197303171997031002

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Karina Wulandari  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/23-02-1996  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah : Jl. Kemang Manis N0.  
604 Rt. 010 Rw. 003  
Kel. Kemang Manis Kec. Ilir Barat II Palembang  
Nomor Telepon/HP : 081366222404  
Alamat Email : karinawulandari100@yahoo.com

### **Pendidikan Formal**

2000-2001 : TK Sandy putra Telkom Palembang  
2001-2007 : SD Xaverius 4 palembang  
2007-2010 : SMP 1 islam Az-zahrah Palembang  
2010-2013 : SMA Negeri 1 palembang  
2013- 2016 : Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi Program Diploma III

### **Pendidikan Tidak Formal**

2015 - 2016 : Pelatihan Kursus computer AMIKOM

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Anggaran .....	8
2.1.1.1 Pengertian Anggaran .....	8
2.1.1.2 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik .....	15
2.1.1.3 Tahap Pengelolaan Anggaran .....	16
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	19

2.1.3 Retribusi Daerah .....	22
2.2 Penelitian Terdahulu .....	26
2.3 Kerangka Pemikiran .....	28
2.4 Hipotesis.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	30
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	31
3.4 Teknik Analisis.....	31
3.4.1 Analisis Deskriptif .....	31
3.4.2 Tipologi Klassen.....	32

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian.....	34
4.1.1 Retribusi di Kota Jakarta.....	34
4.1.2 Retribusi di Kota Surabaya .....	36
4.1.3 Retribusi di Kota Bandung .....	38
4.1.4 Retribusi di Kota Bekasi.....	39
4.1.5 Retribusi di Kota Medan .....	40
4.2 Analisis Tipologi Klassen .....	41
4.2.1 Kota Jakarta.....	41
4.2.2 Kota Surabaya .....	43
4.2.3 Kota Bandung .....	45
4.2.4 Kota Bekasi.....	48
4.2.5 Kota Medan. ....	51

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Saran .....	54

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
----------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

Tabel		Halaman
1.1	Pendapatan Per Jenis Retribusi pada APBD 2017 di Indonesia .....	4
2.1	Daftar Penelitian Terdahulu Tentang Pemetaan Penerimaan Pemerintah.....	26
4.1	Klasifikasi Tipologi Klassen Kota Jakarta .....	41
4.2	Klasifikasi Tipologi Klassen Kota Surabaya.....	43
4.3	Klasifikasi Tipologi Klassen Kota Bandung .....	45
4.4	Klasifikasi Tipologi Klassen Kota Bekasi.....	48
4.5	Klasifikasi Tipologi Klassen Kota Medan.....	51

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2012-2017 .....	2
1.2 Proporsi Sumber Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2012-2017 .....	3
2.1 Kerangka Pemikiran Reoritis .....	28
4.1 Proporsi Sumber Penerimaan Retribusi di Kota Jakarta Tahun 2017-2018 .....	34
4.2 Proporsi Sumber Penerimaan Retribusi di Kota Surabaya Tahun 2017-2018 .....	36
4.3 Proporsi Sumber Penerimaan Retribusi di Kota Bandung Tahun 2017-2018 .....	38
4.4 Proporsi Sumber Penerimaan Retribusi di Kota Bekasi Tahun 2017-2018 .....	39
4.5 Proporsi Sumber Penerimaan Retribusi di Kota Medan Tahun 2017-2018 .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang Masalah**

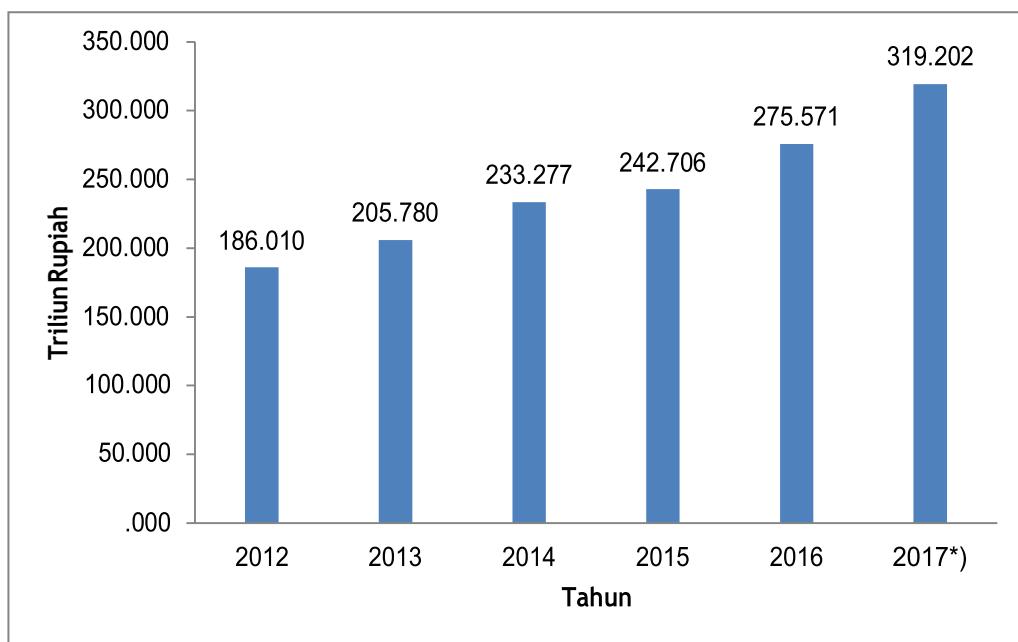
Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralisasi disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini. Di samping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, sistem desentralisasi lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing (Saragih, 2003).

Sejak otonomi Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas dalam melakukan penyelenggaraan pembangunan di daerahnya masing-masing. Ada dua perspektif yang harus diperhatikan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut: (a) Perspektif pertama adalah memandang Otonomi daerah sebagai suatu Peluang untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi daerahnya agar lebih maju dan semua bidang; (b) Sedangkan perspektif yang kedua adalah memandang Otonomi Daerah sebagai sebuah ancaman dikarenakan beban tanggung jawab yang harus dipikul Pemerintah Daerah akan semakin berat (Halim, 2007).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan yang besar kepada daerah dalam upaya peningkatan penerimaan PAD yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan pelayanan. Kualitas pelayanan publik diharapkan bisa lebih baik dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

yang bersumber dari penerimaan retribusi daerah, karena retribusi daerah berkontribusi langsung terhadap penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah (Halim, 2007).

Pemungutan retribusi berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (*Public service*), peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan demikian pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada publik. Secara umum kontribusi retribusi daerah dapat dilihat dari peningkatan realisasi penerimaan pemerintah pada Gambar 1.1 :



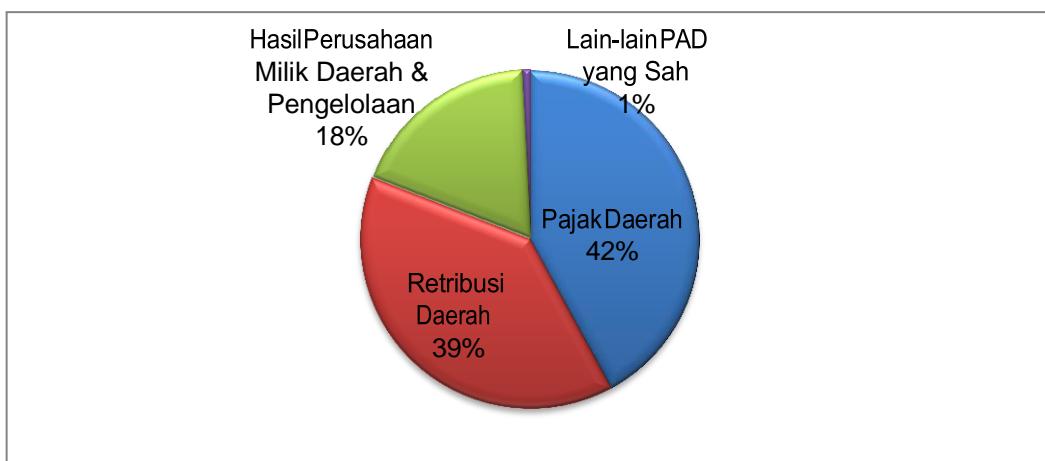
Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2012-2017

Sumber: <http://www.djpkeu.go.id> (data diolah, 2019)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa selama tahun 2012-2017 penerimaan pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 319 triliun rupiah. Kondisi ini disebabkan

oleh meningkatnya sumber-sumber penerimaan pemerintah seperti pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Sedangkan untuk realisasi penerimaan pemerintah yang terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 186 trilun rupiah. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak yang rendah serta realisasi retribusi daerah yang mengalami penurunan.

Secara umum penerimaan pemerintah yang diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Proporsi keempat sumber PAD tersebut selama tahun 2012 - 2017, dapat dilihat pada gambar1.2 :



Gambar 1.2 Proporsi Sumber Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2012-2017

Sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id> (data diolah, 2019)

Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara umum sumber penerimaan pemerintah di Indonesia selama tahun 2012-2017 bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah terbesar yaitu sebesar 42 persen sedangkan untuk retribusi daerah menyumbang sebesar 39 persen penerimaan pemerintah di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya

sumber-sumber penerimaan pemerintah terutama pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber terbesar penerimaan pemerintah di Indonesia. Secara khusus sumber penerimaan pendapatan berdasarkan jenis retribusi dapat dilihat pada

Tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Pendapatan Per Jenis Retribusi pada APBD 2017 di Indonesia

<b>Jenis Retribusi</b>	<b>Pendapatan (Juta Rupiah)</b>	<b>Percentase (%)</b>
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	80.057.958.810	0,433%
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	423.546.429.246	2,288%
<b>Retribusi Pelayanan Pelabuhan</b>	69.108.954.346	0,373%
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	220.400.000	0,001%
<b>Retribusi Perizinan</b>	15.275.515.214	0,083%
<b>Retribusi Lain-lain</b>	70.816.651.440	0,383%
<b>Retribusi Jasa Layanan Umum</b>	16.373.077.369.738	88,457%
<b>Retribusi Terminal</b>	4.552.311.750	0,025%
<b>Retribusi Pemakaian Hak Kekayaan Daerah</b>	1.473.045.672.437	7,958%
<b>Total Pendapatan</b>	<b>18.509.701.262.981</b>	<b>100,00</b>

Sumber: <http://www.djpk.depkeu.go.id> (data diolah, 2019)

Berdarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pendapatan Negara dari penerimaan retribusi hampir seluruhnya disumbang oleh retribusi layanan umum yaitu 88,45 persen, retribusi pemakaian hak kekayaan daerah sebesar 7,96 persen dan retribusi jasa usaha sebesa 2,28 persen. Secara umum penerimaan retribusi disumbang oleh jasa layanan umum. Hal ini dikarenakan jasa layanan umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Usaha sehingga seluruh pelayanan pemerintah yang bersifat umum akan menjadi sumber pendapatan pemerintah dari hasil retribusi tersebut.

Pemetaan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, pajak dan retribusi yang telah diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah. Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah (Kemenkeu, 2017)

Berdasarkan peningkatan penerimaan pemerintah di Indonesia yang semakin tinggi dan proporsi penerimaan pemerintah bersumber dari pajak dan retribusi daerah maka umumnya pemetaan dilakukan untuk melihat sumber-sumber penerimaan daerah terutama retribusi daerah dan pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan pemerintah. Retribusi daerah yang memiliki jenis retribusi yang berbeda-beda memungkinkan adanya perbedaan jenis retribusi daerah yang dikelola di masing-masing daerah. Secara khusus pemetaan dilakukan di 10 Kota besar di Indonesia untuk mengetahui sumber retribusi yang potensial atau unggulan dimasing-masing kota tersebut sehingga kota tersebut bisa mempelajari kebijakan apa yang membuat kota tersebut memiliki keunggulan dari sisi sumber retribusi dan menjadi acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat 14 komponen retribusi daerah yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusinya

terhadap PAD.Terkait dengan fenomena tersebut maka penelitian ini mengkaji Pemetaan Sumber-sumber Retribusi Daerah, yang diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatandari retribusi daerah.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: jenis retribusi daerah manakah yang menjadi sumber unggulan potensial, berkembang, dan terbelakang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah di 5 Kota Besar Indonesia (Menurut Kementerian Keuangan (2017) 10 Kota yang memiliki Penerimaan Daerah tertinggi di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi dan Medan)

### **1.4 Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang diambil maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui jenis retribusi daerah yang menjadi sumber unggulan potensial, berkembang, dan terbelakang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah di 5 Kota Besar Indonesia (Menurut Kementerian Keuangan (2017) 10 Kota yang memiliki Penerimaan Daerah tertinggi di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Bekasi dan Medan

### **1.5 Manfaat**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penulis dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan dapat membandingkan antara teori yang diperoleh selama mengikuti kuliah dengan

penelitian yang dilakukan serta sebagai referensi bagi penulis lainnya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan ekonomi akuntansi sektor publik.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan dalam bidang ekonomi akuntansi khususnya disektor public.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nusa et al.2017. Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukim. *Jurnal Keuda*.Vol.2(3), Hal 1-19
- Cardoso, Gomes, dan Faustino. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan :Realisasi Penerimaan Pemerintah dan Proporsi Penerimaan Pemerintah Seluruh Indonesia 2012-2017.
- Freeman. 2003. *Akuntansi Sektor Publik Anggaran*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Garrison, Norean dan Brewer. 2007. *Akuntansi Manajerial*. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan.Buku 2.Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Horne, James C. Van dan John M Wachowicz Jr. 2012.Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13).Jakarta : Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif: Teori, Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kemeterian Keuangan.2017. Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Indonesia
- Liputo, Dwi Rahma et al.2016.Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Keuda*.Vol.4(2), Hal 180-191.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Muhammad, Teguh.2011.*Metodologi Penelitian Ekonomi* : Teori dan Aplikasi PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Mahmudi.2010.Analisis LaporanKeuangan Pemerintah Daerah.Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat
- Nafarin, M. 2004. *Kamus Besar Akuntansi*. Bandung: Alfabetis
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Pengelolaan Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitra, Halkadri dan Azra, Fefri Indah.Forum.2017.Analisis Kontribusi dan Pemetaan Pajak Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dengan Menggunakan Tipologi Klassen.*Forum Keunagan Bisnis*. Vol.6 (1), Hal 445-460
- Saragih, Juli Panglima 2003.Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghilia Indonesia.
- Sheila. 2013. *Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Sianan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Supriyono, R.A. 1990. *Akuntansi Biaya, Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan*. Edisi kedua.Buku 2. Yogyakarta: BPFE
- Toduho, Dessy Ayuni M, David Paul Elia Saerang dan Ingriani Elim. 2014. *Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Tidore: Jurnal Emba.
- Wardhono, Adhitya.2012. Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan PendapatanAsli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember. *Jurnal Universitas Diponegoro*. Vol.7(2), Hal 69-76.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo